

## ABSTRAK

Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan menjadi salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Semarang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal, sehingga seiring perkembangan waktu membuat jumlah pengangguran semakin banyak. Upaya masyarakat untuk mengatasi permasalahan dari banyaknya pengangguran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan beralih ke sektor informal menjadi pedagang kaki lima. Dalam praktik di lapangan, banyaknya pedagang kaki lima memunculkan berbagai permasalahan. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan adanya bentrokan kepentingan, mengganggu keindahan, ketertiban lingkungan, kemacetan, serta menimbulkan kekumuhan pada lokasi yang digunakan berjualan. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan pengaturan yang baik dan sanksi administrasi yang tegas terhadap pedagang kaki lima di Kota Semarang agar dalam menjalankan usahanya dapat tertib dan teratur.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian dekriptif analitis. Data yang digunakan dalam penulisan berupa data primer dan data sekunder yang diolah menjadi data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang dilakukan dengan pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, perencanaan penyediaan ruang, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan pedagang kaki lima, dan peremajaan lokasi pedagang kaki lima serta Pemerintah Daerah Kota Semarang memfasilitasi pedagang kaki lima melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan. Implementasi sanksi administrasi dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 sudah cukup efektif dibuktikan dengan terpenuhinya parameter efektif yaitu tepat sasaran dan tercapainya tujuan. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan berkaitan dengan implementasi sanksi administrasi dalam penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk patuh pada peraturan yang berlaku, masih ditemukan pedagang kaki lima yang melakukan kesalahan berulang sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penyitaan permanen atau tidak mengembalikan barang sitaan hasil penertiban pedagang kaki lima.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Pedagang Kaki Lima, Efektivitas, Kota Semarang**

## ABSTRACT

*Semarang City as a Metropolitan City is one of the economic centers in Central Java. The large population in the city of Semarang is not commensurate with the availability of formal employment opportunities, so over time the number of unemployed has increased. Community efforts to overcome the problem of large numbers of unemployed so that they can meet their living needs by switching to the informal sector to become street vendors. In practice in the field, the large number of street vendors raises various problems. The existence of street vendors creates clashes of interests, disrupts beauty, environmental order, traffic jams and creates slums in the locations used for selling. To overcome this, good regulation and strict administrative sanctions are needed for street vendors in Semarang City so that they can carry out their business in an orderly and orderly manner.*

*Method the approach used is an empirical juridical method with analytical descriptive research specifications. The data used in writing is primary data and secondary data which is processed into qualitative data.*

*The results of the research show that the arrangement and empowerment of street vendors in Semarang City is carried out by collecting data on street vendors, registering street vendors, planning space provision, determining the location of street vendors, moving street vendors, and rejuvenating the location of street vendors and the Semarang City Regional Government. Facilitate street vendors through guidance, training and capital assistance. The implementation of administrative sanctions in controlling street vendors in Semarang City according to Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 has been quite effective as proven by the fulfillment of effective parameters, namely being on target and achieving goals. Obstacles and efforts to overcome obstacles related to the implementation of administrative sanctions in controlling street vendors include the lack of awareness of street vendors to comply with applicable regulations, street vendors are still found who make repeated mistakes so efforts to overcome this problem are given by government coercive administrative sanctions in the form of permanent confiscation or not returning confiscated goods as a result of controlling street vendors.*

**Keywords : Law Enforcement, Administrative Sanctions, Street Vendors, Effectiveness, Semarang City**